

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 12 TAHUN 2012
 TENTANG
 IDENTIFIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
 KEMENTERIAN SOSIAL YANG TELAH DITERBITKAN

1. UNDANG-UNDANG

NO	UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
1	Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1947 tentang Undian Uang Negara	
2	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian	
3	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang	
4	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan	
5	Undang-Undang Nomor 5 Prps Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan	
6	Undang-Undang Nomor 33 Prps tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan terhadap Pahlawan	
7	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo	
8	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial	
9	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian	
10	Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika	
11	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak	
12	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan	
13	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman	
14	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	

NO	UNDANG-UNDANG	KETERANGAN
15	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat	
16	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika	
17	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika	
18	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	
19	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	
20	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	
21	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	
22	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial	
23	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan	
24	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	
25	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	
26	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	

2. PERATURAN PEMERINTAH

NO	PERATURAN PEMERINTAH	KETERANGAN
1.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Umum Perumahan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat Ke I	
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satyalencana Kebaktian Sosial	
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perumahan	
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan	

NO	PERATURAN PEMERINTAH	KETERANGAN
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 347 Tahun 1964 tentang Panji Pembangunan Sosial	
6.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1966 tentang Peraturan Pemberian Penghargaan dan Jaminan Sosial Kepada para Wakawuri beserta Yatim Piatu Pahlawan yang Ditinggalkan Gugur	
7.	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	
8.	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian	
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1977 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan Kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan	
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis	
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat	
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian	
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin	
15.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 tentang Hubungan Sewa Menyewa Perumahan	
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah	
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah	
18.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah	
19.	Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa	
20.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1993 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis	

NO	PERATURAN PEMERINTAH	KETERANGAN
	Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1992	
21.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat	
22.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lansia)	
23.	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	
24.	Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	
25.	Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak	
26.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Sosial	
27.	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
28.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana	
29.	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan	
30.	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika	
31.	Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial	
32.	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan	
33.	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	

3. PERATURAN/KEPUTUSAN PRESIDEN

NO	PERATURAN /KEPUTUSAN PRESIDEN	KETERANGAN
1	Keputusan Presiden Nomor 227 Tahun 1963 tentang Peraturan tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional	
2	Keputusan Presiden Nomor 228 Tahun 1963 tentang Peraturan Tata Cara Penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional	
3	Keputusan Presiden Nomor 347 Tahun 1964 tentang Panji Pembangunan Sosial	
4	Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965 tentang Permainan Lotre Buntut sebagai Kegiatan Subversi	
5	Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam	
6	Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1968 tentang Pembentukan Panitia Kerja Urusan Repatriasi Suku Maluku	
7	Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1971 tentang Panitia Repatriasi Suku Maluku	
8	Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1973 tentang Penertiban Perjudian	
9	Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggara Undian	
10	Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda	
11	Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1983 tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Penderita Cacat	
12	Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis	
13	Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata	
14	Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 tentang Badan Kebijakan Perumahan	
15	Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana	
16	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang	